**PENGARUH POLITIK DALAM PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR ERA PANDEMI COVID 19 DI PAMEKASAN**

**Political Influence in Free Education Learning in The Era Of The Covid-19 Pandemic in Pamekasan**

**Ach. Khoiri**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

*E-mail:* *ach.khoiri27@gmail.com*

**Zaini**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

*E-mail:* *zainipmks@gmail.com*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Approve:0000-00-00 | Review:0000-00-00 | Publish:0000-00-00 |

***Abstract***

*The Political influence in education, such as compulsory instruction, meanwhile, is difficult to create without astute individuals. Indeed, even the brightest of individuals must be framed through school. Education is directly or by implication influenced by government issues. The amalgamation of instructions and governance issues is plural. For a while, through teaching can shape the people who take part in political life. The reason for the school is to make students mentally minded and have great personalities. The training framework must be able to produce millennial students who are able to compete in the modern-based 4.0 era. Therefore, the educational framework in Pamekasan continues to improve and change. The change in schooling begins with Nadiem Makarim's discourse who proposes the development of "Learning Independence". Nadiem's ​​proposed opportunity aims to make independent instructors have an important meaning for educational units or schools for educators and their students to have the opportunity to advance, adapt freely, and be creative, especially during this corona virus pandemic.*

***Keywords:*** *Political Influence, Freedom to Learn and Pandemic.*

***Abstrak***

Pengaruh Politik dalam pedidikan, seperti instruksi wajib, Sementara itu, sulit untuk menciptakan tanpa individu yang cerdik. Memang, bahkan individu yang paling cemerlang pun harus dibingkai melalui sekolah. Pendidikan secara langsung atau implikasinya dipengaruhi oleh isu-isu pemerintah. Penggabungan instruksi dan isu-isu pemerintahan adalah jamak.

Untuk sementara, melalui pengajaran dapat membentuk orang-orang yang mengambil bagian dalam kehidupan politik. Alasan sekolah adalah untuk membuat siswa berwawasan mental serta memiliki pribadi yang hebat. Kerangka pelatihan harus mampu melahirkan siswa milenial yang mampu bersaing di era 4.0 berbasis modern. Oleh karena itu, kerangka pendidikan di Pamekasan terus mengalami peningkatan dan perubahan. Perubahan persekolahan diawali dengan wacana Nadiem Makarim yang mengusulkan pengembangan “Merdeka Belajar”. Kesempatan usulan Nadiem, bertujuan agar instruktur mandiri memiliki arti penting satuan pendidikan atau sekolah pendidik dan anak didiknya memiliki kesempatan untuk maju, beradaptasi secara bebas, dan berkreasi, terutama di masa pandemi virus corona ini.

***Kata Kunci:*** *Pengaruh Politik, Merdeka Belajar dan Pandemi.*

**INTRODUCTION**

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (2003:145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat.

Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan.

Pendapat mana yang paling sesuai masih bisa diperdebatkan, pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya ada, sebuah contoh; seorang kepala sekolah SMK yang memutuskan kebijakan tentang pola magang bagi siswa-siswanya, apakah keputusan itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah keputusan politik.

**METHOD**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum mormatif yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajian. Penelitian hukum normatif Menurut Johnny Ibrahim, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan bukan hanya meneliti hukum positivis.

Dalam konteks itulah maka penelitian ini berusaha Pengaruh Politik dalam Pendidikan Merdeka Belajar Era Pandemi Covid-19 di Pamekasan. Dan sejauh mana pengaruh politik terhadap pelaksanaan Pendidikan Merdeka Belajar utamanya di masa Pandemi ini.

**RESULTS AND DISCUSSION**

1. **Politik Sebagai Acuan Penyelenggaraan Pendidikan**

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk Amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20 % dari APBN.

Upaya untuk melestarikan kekuasaan negara secara umum dibedakan Tilaar (2003:145-146) dalam beberapa sistem atau pendekatan, yaitu:

1. *Moralisme Religius*, dalam pendekatan ini Negara memberikan arah kepada pendidikannya agar memelihara nilai-nilai moral religius yang dianut oleh negara. Dalam sejarah pendidikan hal ini dikenal pada zaman *scholastic.*
2. *Masa Aufklarung*, munculnya intelektualoisme mendorong Negara mengarahkan pendidikannya kepada pengembangan kemampuan berpikir yang merupakan dasar dari kemajuan. Intelektualisme merupakan tujuan utama dalam pendidikan yang diarahkan oleh negara.
3. *Lahirnya Demokrasi*, hal ini dikenal terutama dalam falsafah pendidikan yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh filsuf John Dewey, yang mengatakan bahwa apabila kiuta berbicara mengenai demokratis maka kita memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi.
4. *Pendidikan sebagai Pengembangan Sumber Daya manusia*, pendekatan dari sudut ekonomi ini menunjukkan betapa pentingnya factor manusia dalam pengembangan ekonomi. Kehidupan ekonomi menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu Negara wajib mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya sebagai asset untuk perkembangan ekonominya. Pendekatan ekonomis dan kebutuhan tenaga kerja menjadi sangat menonjol dalam pandangan ini.

Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Kaitan tersebut terletak pada ;

* 1. Perumusan kebijakan
	2. Proses legitimasi
	3. Proses penyampaian pada khalayak
	4. Proses pelaksanaan
	5. Proses evaluasi.

Perbedaan perumusan kebijakan di negara satu dengan yang lainnya seringkali disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut. Hal itu juga berlaku pada perbedaan pelaksanaan dan evaluasi pada suatu negara. Bagan sistem politik dari Irish & Proth dalam Imron (1996:22) adalah sebagai berikut:

1. **Pendidikan Sebagai Wahana Pembangunan Politik**

Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan.

Pendapat mana yang paling sesuai masih bisa diperdebatkan, pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya ada, sebuah contoh; seorang kepala sekolah SMK yang memutuskan kebijakan tentang pola magang bagi siswa-siswanya, apakah keputusan itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah keputusan politik. Contoh lain adalah peraturan-peraturan tentang pendidikan yang diputuskan pemerintah baik berupa kebijakan atau pedoman sebenarnya merupakan keputusan politik juga.

Hal itu beralasan karena sebelum sebuah peraturan tentang pendidikan diputuskan harus melalui pembahasan yang sangat sengit baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Kita masih ingat bagaimana Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang tertunda penetapannya untuk waktu yang tidak sebentar hanya karena ada salah satu pasal yang menjadi perdebatan. Di sana terjadi tarik menarik antara berbagai kelompok dan itu merupakan sesuatu yang lazim dalam dunia politik.

Dari berbagai generalisasi yang disampaikan terlihat bahwa memang bukan sekedar pendidikan yang berpengaruh dalam perkembangan politik tetapi juga ada budaya yang berkembang pada suatu waktu tersebut. Seberapa penting pendidikan dalam pembangunan politik menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pentingnya pendidikan bagi pembangunan politik yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan berlangsung pada lingkup formal, non-formal dan informal
2. Pendidikan melatarbelakangi atau sebagai basic bagi seseorang dalam kehidupan politik
3. Kondisi politik yang kondusif dapat diciptakan oleh pelaku-pelaku politik yang professional dan bertanggungjawab.

Berbicara tentang kaitan pendidikan dan politik, pada sekolah-sekolah formal kebijakan pendidikan sudah ditetapkan dari pusat walaupun kini sudah melaksanakan otonomi pendidikan. Itulah mengapa dapat dipahami bahwa pendidikan khususnya sekolah dapat menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan juga dapat sebagai suatu tempat penanaman doktrin- doktrin tertentu. Apakah ada yang salah dalam pendidikan formal kita sehingga menghasilkan banyak politikus yang rendah moralnya dengan indikator banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, dan sebagainya.

Bagaimana pendidikan dapat menanamkan nilai–nilai yang baik juga memerlukan dukungan semua pihak, diyakini kemerosotan moral salah satunya karena pendidikan tetapi faktor masyarakat dan budaya yang berlaku juga menentukan. Banyak kendala dalam menanamkan nilai pada anak didik, antara lain:

* 1. Nilai-nilai masih dianggap hanya sebagai pelajaran semata, siswa belum menghayati secara benar bahwa nilai-nilai itu merupakan sebuah aktivitas yang melekat dalam dirinya bukan sekedar materi yang bisa dipelajari dan setelah itu dilupakan.
	2. Dukungan masyarakat disekitar anak didik tinggal yang belum maksimal bahkan rendah, penanaman nilai bagi anak dilingkungan pasar atau terminal tentu lebih sulit dibandingkan dengan penanaman nilai bagi anak-anak di pedesaan yang belum terlalu tersentuh perubahan.
	3. Guru kurang menguasai pola penanaman nilai yang tepat, banyak guru-guru kita yang belum dapat menempatkan perbedaan individual dalam diri anak didiknya sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran.

Demikian kendala yang menghinggapi dalam penanaman nilai bagi siswa-siswa di lembaga pendidikan formal. Apabila pendidikan nilai ini dapat berlangsung dengan baik maka setelah siswa atau anak didik nantinya berada dimasyarakat ia telah memiliki suatu pola nilai yang baik, kondisi demikian juga berlaku dalam kancah politik dimana politikus dengan penguasaan nilai yang baik maka dalam tradisi politiknya ia juga akan menjalankan pola yang baik pula.

Melalui pendidikan yang baik akan menciptaan politikus yang bijaksana atau dalam istilah Mochtar Buchori sebagai *kearifan* yang dapat dicapai lewat berpikir reflektif. Selanjutnya Mochtar Buchori dalam Sindhunata (2000:25) menyampaikan syarat manusia menjadi arif yaitu:

1. Pengetahuan yang luas (*to be learned*)
2. Kecerdikan (*smartness*)
3. Akal sehat (*common sense*)
4. Tilikan (*insight*), mengenal inti hal yang diketahui
5. Sikap hati-hati (*prudence, diskrete*)
6. Pemahaman terhadap norma-norma kebenaran
7. Kemampuan mencernakan (*to digest*) pengalaman hidup.

Kearifan dan kebijaksanaan dapat dibentuk sejak dini dalam diri anak, karena sifatnya yang melekat maka kedua hal itu kurang bisa diukur tingkatannya tetapi dapat dirasakan dan di lihat hasil atau produk yang diperoleh. Selanjutnya berbicara kebijaksanaan kita akan terlintas tentang demokrasi.

Perkembangan demokrasi sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Tilaar (2003:474-476) mengidentifikasi empat masa atau gelombang proses demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi dan Desentralisasi
2. Demokrasi dan Partisipasi
3. Demokrasi dan Pemberdayaan,empowerment
4. Demokrasi dan *Good Governance*

Demokrasi dalam pendidikan lebih ditekankan setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai implikasi otonomi daerah beberapa waktu lampau. Pola demokrasi dalam pendidikan sebenarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan politik dimana di dalam demokrasi terdapat musyawarah, saling menghargai pendapat dan sebagainya. Upaya untuk memperluas dukungan pendidikan terhadap pembangunan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:

1. Menyusun kurikulum yang mampu secara komprehensif memberikan manfaat bagi anak didik dalam kehidupan di masyarakat dan politik nantinya.
2. Menciptakan pola hubungan yang baik antara pendidikan dan politik tetapi dalam koridor pendidikan bukan sekedar politisasi pendidikan.

Membentuk guru yang memiliki kemampuan profesional dan berkarakter kebangsaan sehingga dapat sebagai figure.

1. **Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar**

Empat program pokok yang dikemukakan Mendikbud Nadiem Makarim yang fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia tidak sepenuhnya dapat di terima di masyarakat. Terdapat pro dan kontra dalam masyarakat mengenai gebrakan merdeka belajar dalam dunia pendikan tersebut.

Konsep tersebut bisa membuat guru fokus mengembangkan potensi pada siswa dan terhindar dari bebagai tekanan. Mulai dari tekanan administrasi, penguasaan bahan ajar yang terlalu banyak, dan tekanan kebijakan lainnya. Konsep tersebut bisa memunculkan potensi guru yang memang berbakat dalam mengajar. Namun hal tersebut juga menuai berbagai pertannyaan misalnya Pemahaman konsep Merdeka belajar seperti apa, dan juga pemahaman gurunya tentang merdeka belajar tersebut. Misal instrument merdeka belajar tersebut menghapus UN kemudian tahun berikutnya menggunakan assesment, assesment seperti apa dulu yang digunakan, dan alat ukur terhadap siswanya seperti apa, begitu juga dengan karakter seperti apa pula yang diberlakukan. Dalam menentukan asisment tersebut perlu kajian sebab indonesia merupakan multi budaya dimana karakter yang berbeda beda. Dikatakannya pula perubahan pendidikan khususnya di zaman milenial tersebut sifatnnya terbuka dimana dan mengharapkan menghasilkan generasi yang lebih Inovatif.

UN yang sudah berjalan selama ini akan dihapus pada tahun 2021. Di ungkapkan oleh Dr Yuli Nursanti, M.Pd semua ada plus minusnya . Segi positif dari kebijakan ini ada pada efisien dan efektivitas hasil produk peserta didik. Peserta didik yang termotivasi dengan kebijakan merdeka belajar mereka tetap sungguh – sungguh belajar untuk mencapai hasil yang mereka harapkan. Tetapi untuk siswa yang kurang termotivasi mereka memaknai merdeka belajar adalah merdeka segalanya jadi yang terlihat adalah segi negatifnya, minat belajarnya akan makin turun karena motivasi yang rendah.

Beberapa pengamat pendidikan mengemukakan UN membuat peserta didik menjadi tertekan. Hasil UN tidak atau belum tentu representasi mengenai kemampuan siswa. Pihak yang tidak sependapat dengan UN memberikan alasan bahwa peserta didik yang ada di Indonesia beragam sehingga tidak layak untuk di ukur dengan instrumen yang sama . Menurut mereka pelaksanaan UN yang membutuhkan biaya yang besar sehingga di anggap sebagai suatu pemborosan. Diungkapkanoleh Dr Ety Syarifah M.Pd Kepala SMAN Salaman Kabupaten Magelang, sejumlah pihak tetap meninginkan adannya UN. UN bermanfaat untuk standarisasi kemampuan peserta didik . UN juga dapat memacu persaingan dan kompetisi . Bagi guru dan peserta didik dengan adanya UN menjadikan mereka mempunyai target dalam kegiatan belajar mengajar.

Salah satu dari empat kebijakan yang disampaikan olen Mendikbud yang sudah dilaksanakan adalah Sistem Zonasi PPDB. Diakui atau tidak, ada pengkastaan dalam pendidikan menengah kita, Ada stigma sekolah unggulan dan tidak unggulan. Sekolah unggulan akan menjadi sekolah favorit yang banyak diminati dan dipilih oleh masyarakat. Sehingga sekolah unggulan akan kebanjiran pendaftar sedangkan sekolah yang tidak unggulan akan kurang diminati sehingga kekurangan kuota. Adanya image sekolah favorit menyebabkan timbulnya homogenitas dalam hal latar belakang akademik siswa. Guna menghindari dampak buruk homogenitas sekolah yang berlabel unggulan pemerintah menerapkan Zonasi dalam PPDB. Kebijakan ini diatur oleh permendikbud RI No 17 Tahun 2017. Zonasi sebenarnya bukan sistem baru. Sejak beberapa tahun yang lalu banyak daerah yang sudah menerapkan sistem rayonisasi yang memungkinkan pembagian kuota (Teguh Wibowo:2017).

Sistem Zonasi mencerminkan keadilan dalam memudahkan akses, dan kualitas pendidikan. Sitem zonasi bisa menjadikan sekolah giat belajar karena tidak mendapat stigma murid muridnya kurang pandai (Didik Nurul Ahmadi S.Pd, M.Pd ; 2017). Karena segi positipnya Mendikbud memasukan sisitem zonasi PPDB dalam kebijakan merdeka belajar. Selama ini sistem zonasi selalu mengalami perbaikan dan pembaharuan. Zonasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan haruslah dilaksanakan secara konsisten.Bagi yang tidak setuju sistem Zonasi adalah mereka yang sudah terbiasa dengan sistem kompetisi.

Merdeka belajar lahir dari evaluasi sistem dan proses pendidikan yang selama ini berlangsung. Tujuannya sederhana, agar siswa, guru bahkan orang tua terlibat aktif dalam kegiatan belajar yang menyenangkan; menjadi bagian dari proses pendidikan yang membahagiakan. Karena hakikatnya, pendidikan bukanlah beban. Beban siswa yang dijejali beragam mata pelajaran dan nilai-nilai tertinggi dapat membunuh kerativitas mereka. Beban guru yang lebih banyak terlibat urusan administrasi bahkan kepangkatan yang jadi sebab ruang geraknya tidak merdeka di dalam kelas. Kebijakan "Merdeka Belajar" sebagai momentum untuk mengembalikan [literasi pendidikan](https://www.kompasiana.com/tag/literasi-pendidikan) ke khittah. Khitah pendidikan seharusnya 1) mampu memerdekakan guru dalam mengajar dan 2) memberi ruang kreativitas siswa dalam belajar sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Karena hakikatnya, literasi pendidikan selalu mempersilakan rasa ingin tahu, terjadi komunikasi dialogis, ada ruang kreativitas, dan mampu berkolaborasi untuk meraih kepercayaan diri. Literasi pendidikan itu penting dan melebihi proses pendidikan itu sendiri. (syarif yunus: 2019 )

Penentuan Kriteria Belajar Minimal (KBM) sangat membuat guru tidak merdeka memberikan penilaian kepada peserta didik. Tetapi justru merupakan pemaksaan karena memberi nilai tidak sesuai realita. Luasnya materi yang harus disampaikan menyebabkan RPP juga banyak dan terkesan mengejar materi bukan kualitasnya. Kualitas pembelajaran tidak dilihat dari tebal tipisnya RPP tetapi dari kesungguhan dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri (Herni Budiarti, S.Pd,M.Pd : 2020).

1. **Pelaksanaan Merdeka Belajar Era Pandemi Covid 19 di Pamekasan**

Pelaksanaan program merdeka belajar memerlukan proses dan waktu, perlu kesiapan, perlu kesepakan, dan solidaritas. Karena kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru maka siswa dan guru sama sama harus menyiapkan diri dan saling memberi motivasi. Dengan adanya perubahan paradigma ini , untuk memajukan pendidikan para guru harus menguasai IT. Diharapkan guru generasi dulu bisa beradaptasi dan bisa bersanding dengan guru generasi sekarang (Dr Yuli Nursanti S.Pd, M.Pd:2020)

Program merdeka belajar yang merupakan reformasi pendidikan akan memperoleh hasil yang menggembirakan jika dieksekusi dengan sungguh sungguh. Pemerintah harus meghapus kebijakan kebijakan yang tidak sesuai dan membebani guru. Menyusun kebijakan baru yang diregulasi dan dimplementasi dalam pendidikan. Jika hal tersebut ditindak lanjuti maka tidak mustahil program merdeka belajar tercapai yang akan membuat guru dan peserta didik benar – benar merdeka belajar sehingga dihasilkan generasi muda yang unggul. Dengan kata lain bonus demografi dapat dimanfaatan dan diraih oleh bangsa Indonesia.

Salah satu dari program merdeka belajar usulan Nadiem Makarim yang sudah diterapkan dan berjalan adalah sistem Zonasi PPDB lebih fleksibel. Memang harus diakui dengan adanya sistem zonasi yang berlaku membuat calon peserta didik yang berprestasi tidak dapat memperoleh kesempatan memilih sekolah yang diminati karena memiliki jarak yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggalnya. Tetapi dengan adanya fleksibelitas dalam sistem zonasi pemerintah setempat dapat membuat aturan aturan baru terkait dengan sistem zonasi. Aturan aturan baru adalah berupa berbagai macam jalur yang dapat ditempuh oleh calon peserta didik untuk mendaftarkan diri pada sekolah yang diminatinya. Jalur jalur tersebut antara lain Jalur zonasi murni, jalur prestasi, jalur Afirmasi dan jalur Mutasi.

Merdeka belajar di era industri 4.0 adalah pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis IT. Peran guru adalah mempersiapkan supaya peserta didik eksis menghadapi era revokusi 4.0. Dengan adanya IT peserta didik dapat merdeka mencari sumber informasi dari manasaja. Walaupun demikian peran guru selamanya tak akan terganti. Peran guru yang tidak tergantikan oleh IT adalah tugas mendidik dalam menanamkan norma, etika, dan rasa kasih sayang.

Program merdeka belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim adalah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Program merdeka belajar relevan terhadap tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga mempunyai karakter karakter yang baik seperti tanggung jawab, disiplin, jujur, mempunyai kemampuan berfikir kritis dan analitis serta menjadi manusia yang merdeka sehingga mampu menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut.

**CONCLUSION**

Pendidikan bukan alat politik tetapi politik adalah pendidikan dan sebaliknya pendidikan yang tidak dapat memilih bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. (memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga negara). Di sisi lain supremasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan, pendidikan politik. Tujuan negara Indone- sia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia yang bhineka yaitu terbentuknya masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas (sebagian besar dikota) yang dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Pendidikan terletak dalam tatanan politik.

Sementara itu sentralistik/kekuasaan terpusat menimbulkan dominasi kelompok yang imbasnya adalah pemiskinan sebagai akibat dari kontrol bukan pada masyarakat luas sehingga penguasa menjadi tidak terjangkau oleh hukum. Pendidikan adalah metode yang paling fundamental dalam kemajuan sosial dan reformasi . Reformasi yang dipaksakan akan gagal. Pendidikan merupakan sarana menumbuhkan demokrasi.Contoh: Gerakan reformasi yang berkesinambungan (sustainable) hanya dapat terlaksana apabila terdapat kesinambungan antara generasi sekarang dan generasi penerus (hanya dengan pendidikan).

**REFERENCES**

**Buku**

Ali Imron. (1996). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

H.A.R. Tilaar. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan.* Magelang: Indonesia *Tera.*

Mansour fakih. (2001). *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi.* Jogjakarta:Insist/Pustaka Pelajar.

Mastuhu. (2004). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Sindhunata,Editor. (2000), Menggagas Paradigma baru Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius. Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel. (2001). *Educational Administration*. New York: McGrawHill. Zamroni. (2000). *Paradigma Pendidikan Masadepan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing*.*

**Jurnal, Makalah dan Website**

Angga Sugiarto, Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Keperawatan Pasca Pandemi Covid 19, Jurnal Perawat Indonesia Poltekkes Kemenkes Semarang, Volume 4 No 3, Hal 432-436, Novemberr 2020

Nurtanio Agus Purwanto, Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan, Jurnal Manageman Pendidikan , No. 02/Th IV/Oktober/2008

Dela Khoirul Ainia, Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 3 No 3 Tahun 2020 ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990

**Peraturan, Perundang-Undangan**

Kemendikbud. (2019). “Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar”. Jakarta: Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia